

Informasi bulanan

September 2024

**solvetax**

solutions for your tax

**Konsultasi pajak SolveTax  
StB Dipl.-Bw.(FH) Sascha Schneider  
Konsultan spesialis untuk hukum pajak  
internasional**

Schwindstrasse 2  
63739 Aschaffenburg

Telepon: +49 151 28960404  
E-mail: mail@solvetax.de

Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia senantiasa.

Pengadilan Fiskal Rhineland-Palatinate memutuskan bahwa istilah "tempat kerja" dan bukan istilah "bentuk usaha tetap" yang berubah dengan berlakunya Undang-Undang tentang Perubahan dan Penyederhanaan Perpajakan Perusahaan dan Undang-Undang Biaya Perjalanan Pajak 20.02.2013. Dengan demikian, hal ini menyimpang dari pendapat Kementerian Keuangan Federal.

Pengadilan Fiskal Federal harus memutuskan apakah ada penyalahgunaan perencanaan pajak jika seorang pekerja lepas yang menentukan keuntungannya melalui perhitungan surplus pendapatan menggeser pembayaran sewa khusus ke periode dengan penggunaan mobil secara profesional yang sangat tinggi untuk sementara waktu.

Menurut pendapat Pengadilan Fiskal Federal, ketentuan kewajiban kontinjensi harus dibentuk untuk kewajiban pemberi kerja untuk memberikan cuti pensiun, yang tunduk pada kondisi bahwa karyawan telah bekerja dengan perusahaan setidaknya selama sepuluh tahun dan telah mencapai usia 60 tahun.

Pada 25.07.2024, Kementerian Keuangan Federal menerbitkan rancangan undang-undang tentang pengembangan lebih lanjut dari undang-undang pajak dan penyesuaian tarif pajak penghasilan. Hal ini menunjukkan bahwa RUU Undang-Undang Pajak Tahunan Kedua 2024 tanggal 11.07.2024 telah diubah namanya dan dilengkapi dengan langkah-langkah dari paket pertumbuhan "Inisiatif Pertumbuhan - Dinamika Ekonomi Baru untuk Jerman".

Apakah Anda memiliki pertanyaan mengenai artikel dalam edisi Informasi Bulanan kali ini atau topik lainnya? Silakan hubungi kami.

Kami akan dengan senang hati memberi tahu anda.

## Untuk pembayar pajak penghasilan

---

### Istilah "bentuk usaha tetap" dalam undang-undang biaya perjalanan pajak saat ini

Pengadilan Fiskal Rhineland-Palatinate memutuskan bahwa berlakunya Undang-Undang tentang Perubahan dan Penyederhanaan Perpajakan Perusahaan dan Undang-Undang Pajak atas Biaya Perjalanan pada tanggal 20 Februari 2013 hanya mengubah konsep "tempat kerja" dan bukan gagasan "bentuk usaha tetap" (Ref. 1 K 1219/21).

Dalam kasus sengketa tersebut, penggugat memperoleh penghasilan dari pekerjaannya sebagai konsultan IT. Dia melakukan pekerjaannya empat hari seminggu di kantor terdaftar dari satu-satunya kliennya. Dalam SPT pajak penghasilannya untuk periode penilaian 2016 hingga 2018, ia mengklaim biaya untuk perjalanan dari rumahnya ke pelanggan dan kembali sebagai biaya bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip perjalanan bisnis (EUR 0,30 / km untuk perjalanan ke luar dan kembali) dan bukan tunjangan jarak (EUR 0,30 / km untuk jarak antara rumah pelanggan dan bisnis). Namun, kantor pajak berpendapat bahwa istilah "tempat kerja pertama", yang diperkenalkan oleh Undang-Undang tentang Amandemen dan Penyederhanaan Perpajakan Perusahaan dan Undang-Undang Biaya Perjalanan Pajak pada tanggal 20 Februari 2013, juga penting untuk interpretasi istilah "bentuk usaha tetap". Oleh karena itu, penggugat memiliki "tempat kerja pertama" di pelanggannya, sehingga hanya tunjangan jarak sebesar EUR 0,30 yang harus diterapkan.

Penggugat melakukan banding terhadap hal ini tidak berhasil di Pengadilan Pajak Rhineland-Palatinate. Memang, persyaratan hukum untuk "tempat kerja pertama" dalam arti Bagian 9 EStG (versi baru) tidak terpenuhi dalam kasus yang disengketakan karena beberapa alasan. Namun, "bentuk usaha tetap" tidak akan ditentukan dengan menggunakan istilah "tempat kerja pertama" yang diperkenalkan oleh peraturan baru tetapi terus ditentukan berdasarkan interpretasi sebelumnya dari istilah "bentuk usaha tetap" oleh hukum kasus Pengadilan Fiskal Federal. Oleh karena itu, dalam kasus yang disengketakan, kantor yang terdaftar dari pelanggan penggugat harus dianggap sebagai tempat usahanya, sehingga ia hanya dapat mengklaim biaya perjalanannya antara rumah dan tempat usahanya sebagai biaya bisnis sebesar tunjangan jarak. Menurut pendapat

pengadilan pajak, rumah atau kantor pusat penggugat bukan merupakan bentuk usaha tetap.

### Catatan

Karena Pengadilan Fiskal Federal belum mengambil keputusan atas masalah yang dipersengketakan, Pengadilan Fiskal Rhineland-Palatinate mengizinkan pengajuan banding ke Pengadilan Fiskal Federal. Selain itu, pengadilan pajak berbeda pendapat dengan pendapat Kementerian Keuangan Federal dalam suratnya tertanggal 23 Desember 2014, yang menyatakan bahwa definisi istilah "bentuk usaha tetap" harus didasarkan pada Pasal 9 Undang-Undang Pajak Penghasilan Jerman. Keputusan tersebut belum final, karena penggugat telah mengajukan banding ke Pengadilan Fiskal Federal (BFH no.: VIII R 15/24).

## Pekerja lepas: Alokasi pembayaran leasing khusus untuk total pengeluaran tahunan dalam perjalanan bisnis

Pengadilan Fiskal Federal harus memutuskan apakah ada penyalahgunaan penataan jika seorang pekerja lepas yang menghitung keuntungannya dengan menggunakan perhitungan surplus pendapatan menggeser pembayaran sewa khusus ke periode dengan penggunaan mobil yang sangat tinggi untuk sementara waktu (kasus no. VIII R 1/21).

Untuk menentukan total pengeluaran tahunan untuk perjalanan bisnis sebagai bagian dari kontribusi penggunaan, pembayaran leasing khusus yang dibelanjakan untuk kendaraan yang sebagian digunakan untuk tujuan bisnis harus dialokasikan ke masing-masing periode penilaian selama jangka waktu kontrak leasing, tanpa memperhatikan arus keluar, sebagai bagian dari pendekatan berbasis nilai. Bagian dari pembayaran sewa guna usaha khusus dalam total biaya tahunan untuk perjalanan bisnis dalam satu tahun harus ditentukan secara kumulatif dari rasio kilometer yang dikendarai untuk tujuan bisnis dengan total kilometer pada tahun yang bersangkutan dan secara pro rata temporal sesuai dengan rasio bulan penuh pada tahun yang bersangkutan dan jangka waktu kontrak sewa guna usaha. Hal ini berlaku jika pembayaran leasing khusus berfungsi untuk mengurangi cicilan leasing bulanan selama masa kontrak.

Pengurangan pro rata atas pembayaran sewa guna usaha khusus sebagai biaya bisnis dan sebagai biaya yang berhubungan dengan pendapatan juga tidak dihalangi oleh Pasal 12 no. 1 ayat 2 EStG dalam kasus sebab akibat campuran melalui pendapatan dari wirausaha, dari menyewakan dan menyewakan dan melalui perjalanan pribadi murni di luar lingkup pendapatan kena pajak, karena pembayaran sewa guna usaha khusus merupakan biaya yang dapat dipisahkan berdasarkan komponen profesional dan komponen pribadinya.

## Ketentuan neraca pajak untuk cuti pensiun

Menurut Pengadilan Fiskal Federal, ketentuan kewajiban pajak harus dibentuk untuk kewajiban pemberi kerja untuk memberikan cuti pensiun (dua hari per tahun masa kerja), yang tunduk pada syarat bahwa karyawan telah bekerja di perusahaan tersebut setidaknya selama sepuluh tahun dan telah mencapai usia 60 tahun (Ref. IV R 22/22).

Pengurangan pajak atas ketentuan cuti pensiun masih diperdebatkan. Sebuah perusahaan memberikan hak tahunan tambahan kepada karyawannya yang sudah tua untuk mendapatkan cuti berbayar selama dua hari per tahun sebagai tambahan dari cuti tahunan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Syarat untuk mendapatkan hak tersebut adalah bahwa karyawan tersebut telah bekerja di perusahaan tersebut selama lebih dari sepuluh tahun dan telah melampaui batas usia 60 tahun. Kantor pajak tergugat menolak pertimbangan pengurangan pajak atas penyisihan yang dibentuk untuk tujuan ini.

Pengadilan Fiskal Cologne telah memutuskan untuk memenangkan perusahaan. Para hakim Pengadilan Fiskal Federal menolak banding kantor pajak. Mereka melihat adanya surplus imbalan kerja selama bertahun-tahun masa kerja karyawan kepada perusahaan dan dengan demikian merupakan kewajiban perusahaan yang sudah ada pada tanggal neraca. Tunggakan pemenuhan yang diperlukan untuk pembentukan provisi juga harus diukur berdasarkan keadaan ekonomi. Prinsip-prinsip akuntansi juga berlaku untuk kewajiban berkelanjutan dan dengan demikian - seperti dalam kasus sengketa - untuk hubungan kerja. Bahkan jika, dalam kasus perselisihan, tidak semua karyawan belum memenuhi kedua syarat untuk mendapatkan cuti pensiun, maka kewajiban di masa depan cukup besar kemungkinannya.

### Catatan

Provisi untuk kewajiban kontinjensi harus diakui dalam neraca komersial. **Persyaratan** dalam hukum komersial **untuk mengakui provisi** atas kewajiban adalah salah satu prinsip akuntansi yang tepat dan juga berlaku untuk neraca pajak sesuai dengan Pasal 5 (1) ayat 1 EStG.

## Tunjangan bebas pajak untuk tugas panggilan

Dalam keputusan baru-baru ini, Pengadilan Fiskal Federal memutuskan bahwa pembebasan pajak atas bonus kerja malam didasarkan pada remunerasi bulanan reguler (gaji pokok) dan bukan pada upah panggilan (kasus no. VI R 1/22).

Hal ini mengkonfirmasi pendapat Pengadilan Pajak Lower Saxony bahwa upah dasar dihitung berdasarkan Pasal 3b (2) ayat 1 EStG dan bukan berdasarkan upah panggilan yang lebih rendah. Hal ini didasarkan pada upah reguler karyawan yang telah disepakati secara kontraktual (upah dasar) yang dikonversi ke satu jam dan bukan pada upah per jam yang lebih rendah yang dihasilkan dari konversi upah per jam reguler ke waktu panggilan yang dibayar sebagai waktu kerja. Karyawan tidak perlu berhak atas upah dasar untuk pekerjaan tambahan selain tunjangan kerja tambahan.



## Hiburan karyawan pribadi - alasan "bisnis" untuk biaya hiburan?

Tidak ada alasan "bisnis", terutama jika perusahaan menjamu karyawannya sendiri. Oleh karena itu, hanya biaya jamuan yang terkait dengan bisnis tetapi dikeluarkan oleh karyawan perusahaan sendiri yang tidak dibatasi dalam pengurangannya. Hal ini diputuskan oleh pengadilan pajak Berlin-Brandenburg (kasus no. 6 K 6089/20).

Pembatasan pemotongan (Bagian 4 paragraf 5 kalimat 1 no. 2 EStG) juga mencakup kegiatan yang diikuti oleh karyawan perusahaan bersama dengan pihak ketiga (mitra bisnis, pelanggan, dll.). § Bagian 4 paragraf. 5 ayat 1 no. 2 EStG juga

berlaku jika catering diintegrasikan ke dalam aktivitas bisnis lain dan berada di bawahnya.

### Untuk pembayar pajak upah

---

## **Jumlah upah yang dibayarkan maupun jumlah pajak upah tidak dapat ditentukan dengan tepat - estimasi sah**

Pengadilan Fiskal Nuremberg harus memutuskan apakah kantor pajak berhak untuk mengklaim tiler, yang tidak mungkin menghasilkan omset dengan karyawannya sendiri sejauh yang dinyatakan, dengan surat pemberitahuan kewajiban untuk pajak upah dan jumlah pengurangan pajak upah lainnya (kasus no. 3 K 1158/22).

Jika jumlah upah yang dibayarkan atau jumlah pajak upah yang harus dipotong tidak dapat ditentukan karena pemberi kerja tidak menyimpan catatan yang diwajibkan secara hukum dan oleh karena itu karakteristik pajak dari masing-masing pekerja tidak dapat ditentukan, upah dan pajak upah yang harus dibayar harus diperkirakan sesuai dengan Pasal 162 Kode Fiskal Jerman.

Dalam industri konstruksi yang padat karya, pengadilan umumnya dapat menilai dua pertiga dari omset bersih sebagai total upah bersih dalam kasus hubungan kerja ilegal dalam bentuk pekerjaan yang tidak dilaporkan. Pemberi kerja bertanggung jawab atas pajak penghasilan (pajak upah) yang berkurang karena informasi yang salah dalam akun penggajian atau dalam sertifikat pajak upah.

### Untuk pembayar PPN

---

## **Tidak ada pengenaan pajak atas layanan internal dalam kasus grup pajak**

Pengadilan Eropa telah memutuskan, menyusul rujukan dari Pengadilan Fiskal Federal, bahwa transaksi internal antara perusahaan pengendali dan badan eksekutif dalam arti Undang-Undang PPN Jerman tidak dikenakan PPN dan tidak melanggar hukum Uni Eropa.

### Catatan

Keputusan ini telah menghilangkan ketidakpastian hukum selama bertahun-tahun. Perlu dicatat bahwa pasokan/jasa lainnya dalam kelompok pajak tidak termasuk transaksi internal yang dapat dikenakan pajak, meskipun terdapat transaksi keluaran yang bebas pajak.

Keputusan tersebut juga mengklarifikasi pertanyaan apakah faktur yang tepat diperlukan untuk penyerahan/layanan lain dalam kelompok pajak. Pertanyaan ini muncul untuk menghindari kerugian PPN (tidak ada kredit pajak masukan) jika terjadi keputusan yang bertentangan (penolakan untuk tidak dikenakan pajak).

Kesimpulan: Untuk pengiriman/layanan lain dalam kelompok pajak, faktur yang tepat dalam pengertian PPN tidak wajib.

### Hukum acara

---

## Dimulainya kewajiban untuk memberitahukan penggunaan atau penonaktifan sistem perekaman elektronik

Dalam suratnya tertanggal 28.06.2024, Kementerian Keuangan Federal mencabut kewajiban pemberitahuan yang ditangguhkan terkait penggunaan atau penonaktifan sistem perekaman elektronik.

### Apa maksudnya?

Berdasarkan Pasal 146a (4) Kode Fiskal Jerman, wajib pajak **diwajibkan** untuk **melaporkan penggunaan atau penonaktifan sistem perekaman elektronik**. Dengan surat saat ini, Kementerian Keuangan Federal menetapkan bahwa untuk sistem perekaman yang dibeli mulai 01.07.2025, informasi yang diperlukan harus diberikan dalam waktu satu bulan setelah pembelian. Untuk sistem yang dibeli sebelum

01.07.2025, yaitu semua sistem yang sudah ada, pemberitahuan harus dilakukan paling lambat 31.07.2025.

**Perhatian:** Penonaktifan juga harus dilaporkan! Sebelum sistem lama dinonaktifkan mulai 01.07.2025, pemberitahuan pembelian sistem baru harus diberikan terlebih dahulu.

### **Apa yang harus dilaporkan?**

Informasi berikut ini harus diserahkan secara elektronik ke kantor pajak yang bertanggung jawab melalui program ELSTER yang disediakan untuk tujuan ini:

- Nama orang kena pajak,
- Nomor pokok wajib pajak,
- Jenis perangkat keselamatan teknis bersertifikat,
- Jenis sistem perekaman elektronik yang digunakan,
- Jumlah sistem perekaman elektronik yang digunakan,
- Nomor seri sistem perekaman elektronik yang digunakan,
- Tanggal pembelian sistem perekaman elektronik yang digunakan.
- Tanggal penonaktifan sistem perekaman elektronik yang digunakan.

### **Catatan**

Dalam suratnya, Kementerian Keuangan Federal menunjukkan bahwa semua sistem pencatatan elektronik dari bentuk usaha tetap harus diserahkan dalam satu pemberitahuan. Sistem yang disewakan atau disewa juga harus dilaporkan. Selain itu, ada juga kewajiban pemberitahuan untuk taksimeter dan odometer Uni Eropa. Jika perangkat tersebut digunakan, surat BMF harus dikonsultasikan secara rinci karena desain yang sangat berbeda.

## Hukum jaminan sosial

---

### Manfaat jika ada acara perusahaan

Jika tunjangan bebas pajak sebesar EUR 110 per peserta atau jumlah dua acara yang memenuhi syarat per tahun untuk acara perusahaan terlampaui, maka **tunjangan tersebut merupakan upah kena pajak**. Tunjangan kena pajak dapat dikenakan pajak oleh pemberi kerja dengan tarif tetap sebesar 25% (§ 40 paragraf 2 ayat 1 no. 2 EStG). Pajak dengan tarif tetap yang diizinkan menyebabkan pembebasan kontribusi jaminan sosial. Namun, tidak jelas kapan pemberi kerja harus menerapkan pajak tarif tetap sebesar 25% selambat-lambatnya untuk mendapatkan pembebasan iuran. Oleh karena itu, tunjangan hanya dapat dibebaskan dari iuran jaminan sosial jika tunjangan tersebut tidak dikenai pajak upah atau dikenai pajak dengan tarif tetap dengan slip gaji untuk periode akuntansi yang bersangkutan. Karena batas waktu ini hampir tidak mungkin diterapkan dalam praktiknya, organisasi payung sistem jaminan sosial berpendapat dalam pertemuan mereka pada tanggal 20 April 2016 bahwa pemberi kerja harus sudah menerapkan pajak tarif tetap sebesar 25% paling lambat tanggal 28/29 Februari tahun berikutnya dan membayar pajak tarif tetap ke kantor pajak terkait pada tanggal tersebut.

Sebuah perusahaan yang tidak menerapkan pajak lump-sum hingga bulan Maret tahun berikutnya melawan hal ini dan pada awalnya dimenangkan di hadapan Pengadilan Sosial Regional Lower Saxony-Bremen. Namun, banding diizinkan karena kepentingannya yang mendasar. Pengadilan Sosial Federal membatalkan keputusan awal Pengadilan Sosial Negara Bagian (kasus no. B 12 BA 3/22 R) dan mengukuhkan pendapat lembaga asuransi pensiun yang melakukan peninjauan. Menurut Pengadilan Sosial Federal, faktor yang menentukan adalah bahwa pajak tarif tetap berlaku pada slip gaji untuk periode penggajian yang bersangkutan. Berbeda dengan hukum pajak upah, keputusan harus dibuat untuk hukum asuransi sosial sehubungan dengan pembebasan kontribusi pada bulan di mana remunerasi diterima dan pajak tarif tetap sebesar 25% harus benar-benar terjadi pada akhir Februari tahun berikutnya selambat-lambatnya sesuai dengan hasil pertemuan pada 20.04.2016 (item agenda 5).

## Catatan

Jika pemberi kerja ingin menghindari klaim kontribusi jaminan sosial di kemudian hari, pajak tarif tetap yang tepat waktu sebesar 25% harus dipastikan di masa depan. Dalam hal ini, pajak lump-sum dengan dasar estimasi juga merupakan pilihan sampai biaya akhir dari pihak perusahaan telah ditentukan.

## Perundang-undangan

### Rancangan Undang-Undang Pengembangan Pajak (sebelumnya JStG 2024 II) diterbitkan

Pada tanggal 25.07.2024, Kementerian Keuangan Federal menerbitkan rancangan undang-undang tentang pengembangan lebih lanjut undang-undang pajak dan penyesuaian tarif pajak penghasilan (Tax Further Development Act - SteFeG). Hal ini menunjukkan bahwa **rancangan undang-undang JStG 2024 II** 11.07.2024 telah diubah namanya dan dilengkapi dengan langkah-langkah paket pertumbuhan "Inisiatif Pertumbuhan - Dinamika Ekonomi Baru untuk Jerman" (diadopsi oleh Kabinet Federal pada 17.07.2024).

Peraturan baru diperkenalkan untuk meningkatkan penyusutan

- Reformasi **penyusutan kolektif** dengan memperkenalkan penyusutan **kelompok atau pool** (naik menjadi EUR 5.000)
- Kelanjutan **penyusutan saldo menurun untuk** aset tetap bergerak yang diperoleh atau dibuat **dalam periode 2025 hingga 2028** (Pasal 7 (2) EStG) dan peningkatan kembali menjadi dua setengah kali persentase yang memenuhi syarat untuk penyusutan garis lurus, hingga maksimum 25% (Undang-Undang Peluang Pertumbuhan (Wachstumschancengesetz) telah (kembali) memperkenalkan peraturan ini, tetapi terbatas dalam hal waktu dan persentase)

Yang juga baru adalah

- Meningkatkan pendanaan penelitian dengan meningkatkan basis penilaian
- Kenaikan suplemen langsung di SGB II, SGB XII, SGB XIV, AsylbLG dan BKGG dari EUR 20 menjadi EUR 25 per bulan mulai Januari 2025
- Penyesuaian tentang pemberian tunjangan anak dan tunjangan anak untuk warga negara Uni Eropa
- Penambahan sistem fotovoltaik ke dalam daftar operasi tujuan khusus sebagai bagian dari peraturan tentang status nirlaba (Pasal 68 No. 2b AO)

**Kewajiban pelaporan untuk model penataan pajak nasional** juga disertakan.

Hal-hal berikut ini juga disertakan:

- Perubahan peraturan nirlaba, khususnya mengenai penghapusan pernyataan penggunaan dana dan pembentukan cadangan
- penyesuaian tarif pajak penghasilan
- pengalihan kelas pajak III dan V ke metode faktor
- peningkatan tunjangan anak

Langkah prosedural berikutnya, sebuah pernyataan dari Dewan Federal, dapat diharapkan pada 27.09.2024.

#### Jejak

© 2024 Konten telah disiapkan dengan sangat hati-hati, tidak mengklaim sebagai lengkap dan bukan merupakan pengganti pemeriksaan dan saran dalam kasus-kasus individual.

## Tanggal pajak/jaminan sosial

## September/Oktober 2024

Jenis pajak		Kedewasaan	
Pajak penghasilan, pajak gereja, biaya tambahan solidaritas		10.09.2024 <sup>1</sup>	10.10.2024 <sup>2</sup>
Pajak penghasilan, pajak gereja, biaya tambahan solidaritas		10.09.2024	Tidak berlaku
Pajak perusahaan, biaya tambahan solidaritas		10.09.2024	Tidak berlaku
Pajak pertambahan nilai		10.09.2024 <sup>3</sup>	10.10.2024 <sup>4</sup>
Berakhirnya masa tenggang untuk jenis pajak di atas jika pembayaran dilakukan oleh:	Transfer bank <sup>4</sup>	13.09.2024 <sup>6</sup>	14.10.2024
	Periksa <sup>5</sup>	10.09.2024	10.10.2024
Asuransi sosial <sup>7</sup>		26.09.2024	28.10. <sup>8</sup> /29.10.2024
Pajak keuntungan modal, biaya tambahan solidaritas		Pajak capital gain dan biaya tambahan solidaritas yang harus dibayarkan harus dibayarkan ke kantor pajak terkait pada saat yang sama dengan distribusi laba kepada pemegang saham.	

- <sup>1</sup> Selama sebulan terakhir.
- <sup>2</sup> Untuk bulan sebelumnya, untuk pembayar triwulanan untuk triwulan kalender sebelumnya.
- <sup>3</sup> Untuk bulan sebelumnya, untuk bulan sebelumnya dalam kasus perpanjangan permanen.
- <sup>4</sup> Untuk bulan terakhir, untuk bulan sebelumnya dalam hal perpanjangan permanen, dan untuk kuartal kalender terakhir dalam hal pembayar triwulanan tanpa perpanjangan permanen.
- <sup>5</sup> SPT PPN dan SPT PPh masa depan umumnya harus diserahkan (secara elektronik) paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah periode pelaporan. Jika tanggal 10 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, atau hari libur nasional, maka hari kerja berikutnya adalah tenggat waktunya. Tidak ada biaya keterlambatan pembayaran yang akan dikenakan jika pembayaran terlambat hingga tiga hari. Transfer bank harus dilakukan tepat waktu sehingga tanggal nilai pada rekening kantor pajak sesuai dengan tanggal jatuh tempo.
- <sup>6</sup> Jika pembayaran dilakukan dengan cek, harap diperhatikan bahwa pembayaran tidak dianggap telah dilakukan hingga tiga hari setelah cek diterima oleh kantor pajak. Otorisasi pendebitan langsung harus diterbitkan sebagai gantinya.
- <sup>7</sup> Iuran jaminan sosial jatuh tempo pada hari kerja bank ketiga terakhir pada bulan berjalan. Prosedur debit langsung disarankan untuk menghindari denda keterlambatan pembayaran. Semua dana asuransi kesehatan memiliki tenggat waktu standar untuk mengirimkan laporan kontribusi. Laporan tersebut harus diterima oleh agen penagihan masing-masing selambat-lambatnya dua hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo (yaitu pada tanggal 24.09.2024/24.10.<sup>8</sup> /25.10.2024, pukul 0 pagi dalam setiap kasus). Keunikan regional mengenai tanggal jatuh tempo mungkin perlu dipertimbangkan. Jika akuntansi penggajian dilakukan oleh kontraktor eksternal, data upah dan gaji harus dikirim ke kontraktor sekitar sepuluh hari sebelum tanggal jatuh tempo. Hal ini berlaku khususnya jika tanggal jatuh tempo jatuh pada hari Senin atau pada hari setelah hari libur nasional.
- <sup>8</sup> Berlaku untuk negara bagian federal yang menetapkan Hari Reformasi sebagai hari libur nasional.